



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI YALIMO TAHUN 2021**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA,

RABU, 2 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021

PEMOHON

Lakius Peyon dan Nahum Mabel

TERMOHON

KPU Kabupaten Yalimo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 2 Juni 2021, Pukul 08.48 – 09.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

Lakius Peyon

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jonathan Waeo Salisi
2. Pither Ponda Barany

C. Termohon:

1. Nehemia Walianggen (KPU Kabupaten Yalimo)
2. Okniel Kirakla (KPU Kabupaten Yalimo)
3. Hasyim Asy'ari (KPU RI)

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Johanis H. Maturbongs
2. Yusman Conoras

E. Bawaslu:

1. Amandus Situmorang (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
2. Jamaluddin Lado Rua (Bawaslu Kabupaten Yalimo)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Budi Setyanto
2. Aan Sukirman

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.48 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Yalimo, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Tadi sudah dicek daftar hadirnya, sudah dilaporkan pada kita. Semuanya hadir, baik dari Pemohon, Termohon, maupun calon Pihak Terkait, serta Bawaslu, maka saya tidak akan minta lagi untuk memperkenalkan diri.

Kemudian perlu saya sampaikan, untuk menegakkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan di awal persidangan tadi, sebelum kita dimulai, perlu saya sampaikan bahwa dalam persidangan ini juga kita harus menegakkan betul protokol kesehatan, sehingga durasi persidangan ini juga kita batasi, ya, maksimal 2 jam. Kalau belum selesai, nanti akan di-break untuk disemprot ruangan ini kembali dengan desinfektan supaya kita bersama-sama selalu sehat tak kurang suatu apa pun. Untuk itu, maka saya minta kepada para pihak kalau nanti berbicara, supaya yang efektif, efisien tanpa berpanjang-panjang kata.

Kemudian yang kedua, perkara Kabupaten Yalimo ini adalah perkara baru, yang sekarang ini perkara baru. Jadi bukan perkara yang melanjutkan yang dulu karena putusan yang dulu adalah putusan akhir. Oleh karena itu, semua yang menyangkut kuasa hukum, ya, itu harus diperbaharui surat kuasanya, ya. Untuk sekarang, Pemohon apakah Pemohon sudah dengan surat kuasa baru atau surat kuasa yang lama? Saya minta konfirmasinya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Surat kuasa baru.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Surat kuasa baru. Tertanggal kapan? Saya cek, supaya tidak ada kekeliruan nanti.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Tertanggal 14 Mei.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

14 Mei, baik. Kemudian Termohon untuk Kabupaten Yalimo, surat kuasanya surat kuasa baru atau surat kuasa lama?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Majelis Hakim Yang Mulia, surat kuasa baru tertanggal 25 Mei.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, surat kuasanya juga sudah baru. Untuk Bawaslu?

8. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Yang Mulia?

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, surat penugasan baru atau (...)

10. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Yang baru, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baru?

12. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Yang baru, yang baru.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Surat penugasan baru, ya?

14. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner Bawaslu?

16. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Izin, Yang Mulia. Surat tugas itu ditangani oleh Ketua Bawaslu (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ketua Bawaslu?

18. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kemudian calon Pihak Terkait, meskipun belum jadi Pihak Terkait, tapi masih calon, nanti setelah persidangan ini, baru disahkan untuk menjadi calon pihak ... Pihak Terkait. Apakah Pihak Terkait juga sudah menggunakan surat kuasa baru?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BUDI SETYANTO

Sudah menggunakan yang baru, Yang Mulia. Pada tanggal 24 Mei 2021.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, untuk surat kuasa sudah kita cek dan itu konfirmasinya sudah klir.

Sekarang kita mulai, ada anu ... Pak Suhartoyo, yang mau disampaikan dulu? Cukup. Yang Mulia, ada? Oke.

Kalau begitu kita mulai, sekarang pada agenda hari ini adalah mendengarkan penyampaian permohonan dari Pemohon. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan pengesahan bukti dan nanti setelah itu, kita juga mengesahkan untuk menjadi Pihak Terkait. Sehingga pada persidangan yang akan datang, Pihak Terkait bisa hadir pada persidangan ini yang sekaligus untuk menyampaikan keterangan dari Pihak Terkait. Jadi, sidang yang berikutnya adalah ditambah kehadiran Pihak Terkait secara luring, kemudian penjelasan dari keterangan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu di

persidangan yang akan datang. Pada pagi hari ini, itu acaranya adalah mendengarkan secara lisan permohonan dari Pemohon.

Silakan Pemohon, permohonan Anda yang singkat-singkat, permohonan ini diajukan oleh siapa, pasangan calon nomor urut berapa, diajukan ke ... kapan, dan kemudian ringkasan pokok permohonan dan petitumnya saja, ya, tidak usah dibacakan secara lengkap karena permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan pada tanggal ... perbaikannya 19 Mei 2021. Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami menyampaikan permohonan secara singkat saja.

Bahwa permohonan ini menyangkut pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PEL01.8-KPT/9122/KPU/KAB/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2021.

Bertindak atas nama klien kami Lakius Peyon, SST., Calon Bupati dan Nahum Mabel, S.H., Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Kami atas nama Kuasa Hukum Jonathan Waeo Salisi dan Pither Ponda Barany, S.H., M.H.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kapan permohonan ini diajukan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Permohonan ini kami ajukan tanggal 17 Mei 2021.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, perbaikannya kapan diajukan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Perbaikannya tanggal 19 Mei 2021.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Kami langsung masuk pada permohonan pokok perkara saja, Majelis.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Bahwa ada 3 hal yang menjadi dalil permohonan ini, yakni pertama, adanya Putusan Peradilan Nomor 500 Pidana Khusus 2020 PN Jayapura yang merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap terdakwa Erdi Dabi, S.Sos., yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk karena minuman keras yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana Ketentuan Pidana Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan ancaman pidana 12 tahun. Dan telah berkekuatan hukum sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2021, sehingga terdakwa Erdi Dabi, S.Sos tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya potong sebentar.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Siap.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalil ini ada buktinya P berapa, putusan pengadilan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ada, Majelis.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada. Bukti P berapa? Ya, mestinya cepat itu, kan permohonan yang buat Anda. P?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

P-88, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu? Berupa apa itu bukti fisiknya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Putusan pengadilan (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Putusan Pengadilan PN Jayapura?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

PN Jayapura. Kemudian, P-89, itu serah terima terpidana. Kemudian, eksekusi P-95 itu dengan P-96, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-96? Baik.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya. Kemudian, P-97 laporan dari eksekusi kepala Kejaksaan Negeri Jayapura kepada Kejaksaan Tinggi bahwa telah melaksanakan eksekusi dan terpidana sudah ada di rutan.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ini kompliit ya, yang disebutkan, ya? Bukti fisiknya sudah masuk, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Sudah masuk, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, nanti disahkan. Silakan diteruskan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Terima kasih, Yang Mulia kami, lanjutkan (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dihidupkan itu miknya!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Termohon telah mengubah hasil rekapitulasi perhitungan suara pada hasil perhitungan pada PPD Welarek. Perhitungan oleh PPD Welarek semula Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 1.068 dan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 20.742. Diubah oleh Termohon menjadi Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.236 dan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 17.464.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, buktinya di P berapa ini, bukti fisiknya? Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Yang Mulia, bukti fisiknya ada di P-5 dan P-6, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-5 dan P-6, oke. Terus, lanjutkan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Termohon telah menyalahgunakan rekomendasi Bawaslu tentang rekomendasi rekapitulasi ulang untuk memberhentikan PPD Welarek dan mengambil alih tugas dan wewenang PPD Welarek secara sewenang-wenang seketika pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Yalimo. Tindakan Termohon yang mengubah hasil rekapitulasi penghitungan PPD Welarek berdasarkan C Hasil yang dibawa sendiri tim calon 01 ke Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus, silakan. Saya tanya dulu, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, PSU-nya harus dilaksanakan di mana? Pemohon tahu?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Tahu, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di mana PSU-nya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Welarek.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Distrik Welarek?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ada 2, Majelis.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Welarek dengan 2 (...)

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Distrik Welarek dan di mana? Ini yang dipersoalkan di Welarek?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Cuma Welarek saja, Yang Mulia, yang kami persoalkan.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang dipersoalkan hanya di Welarek saja, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya, Kecamatan Welarek, Distrik Welarek. Jadi distrik yang satu itu kami enggak persoalkan, Yang Mulia.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak dipersoalkan?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya. Ada 2 distrik yang ... apa (...)

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Cuma yang Distrik Welarek saja yang kami persoalkan, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. DPT di Welarek berapa menurut Pemohon? Bisa? Enggak ketemu? Saya tanya Termohon, Distrik Welarek DPT-nya berapa?

73. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Majelis, untuk Distrik Welarek DPT-nya 21.810 Majelis.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

21.810?

75. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, benar Majelis.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini menurut Termohon, ya, untuk Pemohon nanti ... berapa? Sama enggak, Pemohon? Supaya kita berangkatnya itu dari yang sama atau tidak sama, nanti di mana yang tidak betul. Kalau begitu Bawaslu? Betul? Anda tahu?

77. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Untuk DPT Welarek 21.810.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, confirm, ya, dengan apa yang disampaikan Termohon, ya. Baik, diteruskan Pemohon. Jadi, ada persoalan yang terjadi di Distrik Welarek menurut Pemohon, gitu ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Persoalannya itu tadi mengubah itu, satu, mengubah itu perolehan suaranya dan kemudian ada yang ... apa ... kesewenangan KPU untuk mengganti PPD?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu dalilnya. Terus apa lagi?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya, kami lanjut, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi yang pertama dalil pengalihan suara kan?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang perolehan suara.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Pertama tindak pidana, putusan pidana.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, yang ke itu ya, itu. Sekarang berhubungan dengan angka?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya, dengan yang kedua selisih penghitungan di Welarek.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, pengalihan perolehan suara?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Paslon 2 kepada Paslon 1?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya, Yang Mulia.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, toh. Terus yang kedua, persoalan yang menyangkut penggantian sewenang-wenang PPD Welarek?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

PPD Welarek. Ya, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Yang dilakukan oleh Termohon, kan gitu?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya, kami sampaikan Termohon melakukan pembiaran terhadap perbuatan membawa kabur Dokumen C Hasil.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada Dokumen C yang dibawa kabur oleh ... siapa yang bawa kabur?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Tim 01.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tim 01?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu di C mana itu? C apa itu? Sori. C-1 Hasil Penghitungan?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di Distrik Welarek yang menyangkut kampung mana?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ada 13 kampung, Majelis, 16 TPS.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

109. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Datanya ada di tabel (...)

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada sekelompok orang yang membawa kabur Dokumen C-1 Hasil Penghitungan di Kampung Saly, Kampung Hilariki, Kampung Suntang, Kampung Irarek, dan Kampung Silfal. Betul?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya, betul Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, betul, ya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya, Yang Mulia.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu dalil berikutnya. Terus ada lagi?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Dokumen dibawa dan dimunculkan di rapat pleno kabupaten.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi pada waktu di tingkat PPD, tidak terdokumentasi dengan baik?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPD, tapi langsung di tingkat kabupaten?

119. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Majelis, rekapitulasi tetap dilakukan terhadap 13 kampung yang dibawa dari dokumennya, itu berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan dan disaksikan oleh panwas yang memberikan rekomendasi bahwa perhitungan sudah dilakukan di TPS (...)

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Rekapitulasi di PPD tetap dilaksanakan.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

123. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Cuma berdasarkan data lapangan (...)

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Urutan-urutan prosesnya di tiap kampung, juga sebetulnya sudah dilakukan penghitungan suara?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Penghitungan. Ya.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian di tingkat PPD Welarek, juga sebetulnya sudah dilakukan rekapitulasi?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Sudah dilakukan, Yang Mulia.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Sudah dilakukan.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilakukan di situ?

131. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Di tingkat PPD.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

PPD?

133. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus gimana? Di tingkat (...)

135. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Selanjutnya (...)

136. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Selanjutnya pada rapat pleno di kabupaten (...)

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

PPD Welarek setelah mempresentasikan hasil rekapitulasi di Distrik Welarek, mereka diberhentikan seketika itu dan disuruh meninggalkan lokasi rapat pleno.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi penghentiannya itu pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Kabupaten.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di tingkat Kabupaten Yalimo, ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus ada dalil yang lain lagi?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Termasuk setelah ... selanjutnya, saksi kami juga dikeluarkan.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

146. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi PPD-nya diusir, disuruh pergi, dan digantikan. Kemudian saksi pasangan calon nomor urut berapa yang di suruh pergi?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Nomor Urut 2.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor Ururt 2?

150. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak boleh?

152. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Tidak boleh ikut.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nanti kita minta konfirmasi seluruhnya, supaya jelas. Ada lagi dalilnya? Cukup, ya, saya kira, pembacaan saya.

154. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Cukup.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk dalil-dalilnya, ya.

Oke, kalau begitu, sekarang silakan baca Petitemnya, secara lengkap dibaca Petitemnya.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Petitem. Pertama, kami mohon mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL01.8-Kpt/9122/KPU-Kabupaten/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, tertanggal 11 Mei 2021 sebatas rekapitulasi pada Distrik Welarek adalah batal, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kedua, memerintahkan Termohon memperbaiki penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, tertanggal 11 Mei 2021 sebatas rekapitulasi pada Distrik Welarek sebagai berikut.

1. Pasangan calon bupati (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tidak usah disebutkan namanya. Pasangan Nomor 1 memperoleh berapa?

158. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Pasangan Nomor 1 memperoleh 1.068. Nomor ... Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 20.742.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Empat, menyatakan memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021.

Nomor Urut 1, perolehan suara pasangan sebelum PSU=36.776. Perolehan suara di Distrik Welarek setelah PSU=1.068. Perolehan suara

PSU di Distrik Apalapsili=6.769, sehingga perolehan total suara adalah 44.613.

Kedua, Pasangan Nomor Urut 2 perolehan suara sebelum PSU=24.948, perolehan suara di PSU Distrik Welarek=20.742, perolehan suara di Apalapsili=645, sehingga total perolehan suara= 400 ... 46.335 suara.

Kelima. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Erdi Dabi, S.Sos. dan John Willi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Yalimo Nomor 44 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 karena tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

Enam. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 045 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo September 2020 adalah batal sebatas menyangkut penetapan nomor 1, Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Erdi Dabi dan John Willi.

Tujuh. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu ada, "Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya." Ya? Ex aequo et bono dibacakan juga, ya?

162. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan juga.

Baik, Yang Mulia Pak Suhartoyo, ada yang akan dianu? Monggo, silakan.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti ... ini mohon apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Ketua tadi untuk putusan pengadilan yang inkraht itu sudah? Memang Pemohon punya buktinya inkraht?

165. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ada.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, sudah terpidana?

167. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Ya.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, satu.

Kemudian yang kedua begini, meskipun ini juga harus dibuktikan bersama antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait ... ada Pihak Terkait, ya, Prof? Pihak Terkait nanti.

Satu, pertama bahwa Pasal 7 ayat (2), ini berkaitan dengan pencalonan, Ketika pencalonan awal seseorang akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Itu, yang kemudian bagaimana ketika ini menjadi terpidananya. Kalau betul argumennya Pemohon, betul-betul sudah inkraht dan statusnya sudah terpidana, ini sudah di tengah atau sudah di babak menjelang akhir. Ini sangat berbeda dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b itu. Itu syarat awal, nanti mohon KPU juga bisa menjelaskan, bisa diskusi dengan KPU pusat, KPU RI.

Kemudian begini, ada putusan MK jangan dipotong-potong. Tidak hanya ini putusan MK, itu ada rangkaian putusan sebelumnya. Itu yang sudah mengeluarkan bahwa tidak termasuk itu tindak pidana kealpaan, kemudian ... bahkan yang terbaru, bagi pengguna narkoba yang karena ... apa ... karena ... bukan karena ketergantungan karena memang dia korban.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Korban.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, ada rangkaian putusan-putusan dan itu semua ada putusannya, Pak. Termasuk kalau dulu kealpaan yang dimaksud dalam Pasal 359 KUHP sebelum muncul Pasal 311 tentang lalu lintas ini, kan dulu, Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP, "Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati." Itu dulu pengendara lalu

lintas, yang kemudian mengalami kecelakaan dan ada korban. Kalau *luka-luka* di Pasal 360, kalau *meninggal* di Pasal 359, itu kategorinya dulu kelalaian, kealpaan, Pak. Nah, sekarang di Pasal 311 ini memang kesengajaan, sengaja. Ini nanti dikaitkan dengan putusan MK itu, Pak, jangan diambil sepotong begini. Ini putusan ada rangkaiannya di samping yang menegaskan *dikecualikan tindak pidana tertentu*, itu tidak masuk kemudian berlaku secara 5 tahun itu. Itu salah satunya yang saya ingat adalah kealpaan dan narkotika. Terakhir narkotika yang memakai ... eh, korban.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Korban.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi nanti supaya dirangkai itu, Termohon juga bisa mencermati putusan-putusan MK itu, jangan kemudian nanti ini hanya semata-mata *tidak memenuhi Pasal 7 ayat (2) huruf g*, padahal ini syarat di depan.

Nah kemudian yang kedua yang perlu dicermati juga, bagaimana ketika seseorang menjadi terpidana itu sudah di titik tengah atau titik akhir? Apakah itu pembatalannya ada pada ketika akan dilantik atau ... kalau Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu klir. Jadi kalau mau dilantik, menjadi terpidana, kemudian bisa dibatalkan atau bagaimana, tapi itu juga dikaitkan dengan dia menjalani pidana apa? Tidak semua tindak pidana itu kemudian bisa membatalkan ... apa ... hasil seseorang yang sudah menjadi pemenang kemudian serta-merta bisa dibatalkan, itu ada pasal-pasal juga. Nanti supaya itu dikait-kaitkan juga ... dikaitkan ketika KPU dan Pihak Terkait menjawab, ya supaya klir semua bisa kita ... apa ... petakan di persidangan ini.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak ketua.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Jadi, untuk pembuktian nanti kita bersama ya, itu nanti, Pak, anu ... kalau sidang itu dilanjutkan, Pemohon juga diperhatikan.

Termohon nanti bisa berkonsultasi dengan KPU Pusat ya, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, begitu juga Bawaslu.

Juga Pihak Terkait bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo? Pak Budi, Pihak Terkait? Pihak Terkait masih ... monitor Calon Pihak Terkait?

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BUDI SETYANTO

Ya.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BUDI SETYANTO

Yang Mulia, Pihak Terkait bisa mengerti dan memahami. Terima kasih.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

Yang Mulia Prof. Enny, ada yang bisa disampaikan untuk mendalami apa yang sudah disampaikan oleh Pemohon? Silakan!

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih, Pak Ketua.

Begini, untuk Pemohon, ya. Ini kan Pemohon mendalilkan bahwa C.Hasil Hologram itu dilarikan oleh tim pemenangan. Tapi dicari buktinya belum ada, ya. Tolong nanti dibuktikan itu ya, buktinya apa yang dilarikan oleh tim pemenangan untuk C.Hasil Hologram itu ya, di dalilnya di angka 14 halaman 19, ya. Siapa yang melarikan, kemudian bagaimana melarikannya, ya? Itu tolong ditambahkan bukti itu.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan, di dalil yang berikutnya di angka 16 halaman 23, itu terjadi perubahan perolehan suara yang disebabkan ... untuk 13 kampung, 16 TPS ya, yang telah direkap di distrik tadi. Ini juga buktinya berapa yang diubah, ya? Sebelum dan sesudahnya seperti apa? Itu tolong nanti disampaikan, ya. Jadi, 2 hal itu yang saya lihat ... apa namanya ... untuk buktinya belum klir.

Kemudian yang berikutnya adalah ini yang terkait dengan ... kan yang dipersoalkan hanya distrik Welarek saja kan, yang Apalapsili kan tidak, ya?

179. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Tidak, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini kemudian yang di ... tapi ini sudah jadi ... sebentar, di petitum ini, ya. Bukan. Di halaman 27 ya, 27? Ini yang di bawah ini maksudnya apa, ya? Ini 27 ini kan kelanjutannya di angka 4 yang menyatakan yang benar tadi, ini kan sudah masuk ke petitum, ya.

Itu kemudian ada distrik Apalapsili, ya. Ini Apalapsili ini kemudian muncul di sini, tetapi Anda tidak menjelaskan, ini terus tolong dibuktikan nanti, ya. Yang Distrik Apalapsili kaitannya dengan jumlah suara dari para ... dari masing-masing paslon itu Anda munculkan di sini, ini sama dengan kemudian yang ada di distrik ... apa namanya ... Welarek. Apakah ini gabungan dari Distrik Welarek dan Apalapsili dan/atau hanya Apalapsili saja di halaman 25, ya? Karena muncul di judulnya adalah Distrik Apalapsili di atasnya itu, gitu. Jadi, ini menimbulkan pertanyaan apakah ini hanya untuk satu distrik saja, apakah gabungan keduanya?

Ya, demikian, Pak Ketua.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Begitu ya, Pemohon ya, bisa dimengerti ya. Baik, kalau begitu (...)

182. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Izin, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya melangkah agenda berikutnya. Perlu disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum ini, Mahkamah menerima permohonan dari Kuasa Hukum Erdi Dabi S.Sos., dan John W. Willi untuk menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2020.

KETUK PALU 1X

Kemudian, memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi E-BRPK dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari dan tanggal, serta jam yang telah ditentukan nanti ya, Pak Budi. Jadi, pada sidang yang berikutnya, Anda dipersilakan untuk duduk di depan sini, ya?

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BUDI SETYANTO

Siap, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang berikutnya, perlu saya sampaikan kepada Pihak Terkait. Permohonan Pihak Terkait atas anu ... yang diajukan kuasa hukumnya untuk melakukan inzage dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, dikabulkan. Silakan setelah persidangan ini, silakan untuk inzage bukti-bukti yang akan disahkan oleh Majelis Panel untuk Saudara tinjau dan lihat dalam rangka untuk menyusun keterangan Pihak terkait, dan juga Termohon juga dipersilakan nanti bersama-sama, termasuk Bawaslu dan juga Pemohon, silakan, ya!

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BUDI SETYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Sekarang yang terakhir, Pemohon, masih ada yang akan disampaikan atau sudah cukup?

188. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Izin, Yang Mulia. Sebagaimana tadi Majelis menyatakan tentang Bukti C Hologram itu (...)

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

190. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Kami cuma ada bukti film di P-92 dengan P-93. Ketika rapat pleno itu di ... diantar, dan dibawa, dan dipertunjukkan oleh KPU (...)

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

192. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya (...)

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti itu termasuk bukti yang akan saya sahkan, Bukti P-1 sampai dengan P-103 sudah masuk, kan?

194. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Sudah masuk, Yang Mulia.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

196. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

198. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Terima kasih, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau begitu, Saudara Pemohon, nanti akan dilihat bersama-sama, ini disahkan. Bukti yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-103, ya, begitu, Pemohon?

200. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Siap, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ya. Pak Hasyim, KPU pusat juga bisa mendengar persidangan ini?

202. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Siap, Yang Mulia, mendengar.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Hasyim.

204. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Bawaslu ... Bawaslu yang hadir di media center, siapa itu?

206. BAWASLU:

(Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

208. BAWASLU:

Terima kasih.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Bisa mengikuti persidangan di sini?

210. BAWASLU:

Bisa, Yang Mulia.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Pemohon, masih ada yang mau disampaikan?

212. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANY

Cukup, Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Ya, begitu, Termohon, dan Bawaslu, serta Pihak Terkait, nanti silakan duduk di depan pada persidangan yang akan datang.

214. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Izin, Majelis.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum saya ... dari siapa?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Dari Termohon, Majelis.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Termohon?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Gimana?

220. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Ya, Majelis, terkait dengan proses pembuktian yang akan diajukan oleh Termohon. Sampai pada hari ini, Termohon belum ... belum diizinkan untuk membuka kota, yang dimana kotak itu terdapat C Hologram untuk pembuktian dalam persidangan ini.

Kami mohon izin kepada Majelis, kepada Mahkamah untuk kami membuka kotak yang sudah diantar dari Yalimo ke Jakarta.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebagaimana biasa yang sudah terjadi di persidangan pilkada. Dalam upaya untuk pembuktian dalil dari Pemohon, maka Termohon diizinkan untuk membuka dengan syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, ya.

Jadi, Pemohon[Sic!] bisa membuka kotak, disaksikan oleh saksi dari semua pihak, disaksikan oleh Bawaslu, dan disaksikan oleh aparat kepolisian, gitu, ya?

222. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Terima kasih, Majelis.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, ya?

224. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Cukup, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sidang untuk mendengarkan Keterangan Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, serta Bawaslu, akan diselenggarakan penundaannya sampai pada hari Jumat, 4 Juni 2021, pada pukul 08.30 WIB, dengan agenda untuk sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, dan bisa saja nanti ada bukti tambahan dari Pihak Pemohon, ya. Sudah bisa dipahami?

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BUDI SETYANTO

Paham, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Paham. Termohon, paham?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Paham, Majelis.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu, paham?

230. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Paham, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait, sudah paham, ya? Klir, ya?

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BUDI SETYANTO

Ya, klir.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih atas persidangannya pagi hari ini (...)

234. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Izin, Yang Mulia.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari?

236. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Hasyim.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Silakan, Pak Hasyim!

238. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan apa yang disampaikan Ketua Majelis tadi bahwa sidang berikutnya dibuka kembali pada hari (...)

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jumat.

240. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Jumat, tanggal 4 Juni.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

242. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Nah, tadi juga disampaikan bahwa alat bukti Termohon yang masih ada dalam kotak belum dibuka. Nah, ini saya tanya kepada teman-teman KPU Yalimo, kotak suara tersebut yang masih tersegel, posisi barangnya ada di Jakarta, Yang Mulia. Jadi, tidak perlu teman-teman kemudian buka di Yalimo. Mohon izin kemudian dibuka di Jakarta, mungkin nanti akan dibuka di kantor KPU, tentu saja dengan disaksikan oleh Bawaslu (...)

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

244. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Dan kepolisian.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

246. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Demikian, Majelis, terima kasih.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sesuai dengan peraturan perundangan, Kuasa Hukum Pemohon juga silakan hadir di sana dan Kuasa Hukum dari Pihak Terkait juga dipersilakan hadir di sana waktu pembukaan kotak, ya.

248. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Hasyim, terima kasih.
Saya kira, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.29 WIB

Jakarta, 2 Juni 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

